URGENSI RISET AGAMA

Published: Tribun Jateng, 7 Juni 2021

<https://jateng.tribunnews.com/2021/06/07/opini-aji-sofanudin-urgensi-riset-agama?page=all>

Opini

SEHILU, 7 JUNI 2021 | Tribun Jateng

Urgensi Riset Agama

GAGASAN presiden Jokowi untuk mengkonsolidasikan seluruh SDM peneliti sangat bagus. Gagasan ini kemudian didukung oleh DPR dengan menerbitkan UU Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Secara lebih operasional, muncul Perpres Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 74 Tahun 2019.

Dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2021, selain mengatur BRIN sebagai lembaga yang menjalankan Litbangtrap serta invest dan inovatif pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dapat membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) merupakan lembaga pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Sementara BRIDA dibentuk oleh gubernur, bupati, wali kota sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

Yang regulasi tersebut akan mengatur riset bidang agama. Kelembagaan dalam Pasal 9 Perpres Nomor 33 Tahun 2021, tidak menyebutkan adanya ke deputian yang menangani masalah agama dan keagamaan. Ibarat rumah, tidak ada kamar bagi peneliti bidang agama dan keagamaan dalam rumah BRIN.

Membuang Riset Agama Rumor bahwa agama merupakan bidang yang tidak didesentralisasikan. Kebijakan pembangunan bidang agama bersifat sentralistik. Selaras dengan itu, SDM peneliti keagamaan juga terpusat di Jakarta. Padahal agama sebagai sumber nilai yang sangat penting bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Beribarat Indonesia, berarti kita sedang membicarakan agama (baca Islam) Islam yang dibangun adalah Islam rahmatan lil alamin. Islam yang selaras dengan Pancasila sebagai falsafah negara. Islam yang hadir sebagai ruh dalam denyut kehidupan bangsa Indonesia.

Penelitian agama, selain memiliki nilai historis juga telah menunjukkan manfaat nyata untuk bangsa. Stabilitas nasional bisa tercapai manakala kerukunan umat beragama tercapai. Selain memang, riset agama memberikan sumbangsih nyata terhadap berbagai kehidupan negara. Tak terkecuali mendorong mewujudkan Indonesia yang maju.

Sebenarnya ada "jalan keluar" dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2021 tentang BRIN agar riset agama tidak hilang sama sekali. Meskipun, tidak masuk ke deputian tertentu, riset bidang agama dan keagamaan bisa masuk sebagai unsur pendukung menjadi "pusat" keagamaan tertentu pasal 41 dan 42. Persoalannya adalah apakah lembaga BRIN (sebagai representasi pemerintahan) mau membuka "ruang" membentuk misalnya Pusat Penelitian Agama dan Keagamaan? Secara teknis, caranya mudah konsolidasi dengan transformasi secara kelembagaan. Secara mudah, bergeser ke BRIN.

Sebaliknya, jika "jalan keluar" ke BRIN, soalannya adalah apakah Kementerian Agama "diizinkan" mengelola SDM, infrastruktur dan anggaran ke BRIN?

Pertanyaan serupa, apakah sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang membidangi penelitian, pengembangan, pendanaan dan penerapan Litbangtrap, inovasi dan inovasi akan kamar baru untuk penelitian? Secara teknis, Pasal 41 dan 42 Perpres Nomor 33 Tahun 2021 membuka ruang untuk itu. Justru tentu bisa dengan merevisi 33 Tahun 2021 dengan menambahkan agama dalam ke deputian sendiri.

Dengan cara ini, kesimpulannya, riset agama dan keagamaan bisa masuk sebagai unsur pendukung menjadi "pusat" keagamaan tertentu.

Sumber Nilai Padahal agama sebagai sumber nilai yang sangat penting bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Beribarat Indonesia, berarti kita sedang membicarakan agama (baca Islam) Islam yang dibangun adalah Islam rahmatan lil alamin. Islam yang selaras dengan Pancasila sebagai falsafah negara. Islam yang hadir sebagai ruh dalam denyut kehidupan bangsa Indonesia.

Penelitian agama, selain memiliki nilai historis juga telah menunjukkan manfaat nyata untuk bangsa. Stabilitas nasional bisa tercapai manakala kerukunan umat beragama tercapai. Selain memang, riset agama memberikan sumbangsih nyata terhadap berbagai kehidupan negara. Tak terkecuali mendorong mewujudkan Indonesia yang maju.

Sebenarnya ada "jalan keluar" dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2021 tentang BRIN agar riset agama tidak hilang sama sekali. Meskipun, tidak masuk ke deputian tertentu, riset bidang agama dan keagamaan bisa masuk sebagai unsur pendukung menjadi "pusat" keagamaan tertentu.

Dengan cara ini, kesimpulannya, riset agama dan keagamaan bisa masuk sebagai unsur pendukung menjadi "pusat" keagamaan tertentu.

Hotline Public Service

Hubungi NASIRIN di HP: 085725637935 atau nomor WA: 085725637935
SURAT: Tribun Jateng, Jalan Meranti Supena No. 30 Kota Semarang
Email: redaksi.tribunjateng@gmail.com

Anak-anak Nongkrong di Jangli Meresahkan

GAGASAN presiden Jokowi untuk mengonsolidasikan seluruh SDM peneliti sangat bagus. Gagasan ini, kemudian didukung oleh DPR dengan munculnya UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Secara lebih operasional, muncul Perpres Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 74 Tahun 2019.

Dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2021, selain mengatur BRIN sebagai lembaga yang menjalankan Litbangjirap serta invensi dan inovasi, pemerintah daerah (provinsi dan kab/kota) dapat membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida). BRIN merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Sementara BRIDA dibentuk oleh kepala daerah (Gubernur/ Bupati/Walikota) sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

Sayang, regulasi tersebut alpa mengatur riset bidang agama. Ketentuan dalam Pasal 9 Perpres Nomor 33 Tahun 2021, tidak menyebutkan adanya ke deputian yang membidangi masalah agama dan keagamaan. Ibarat rumah, tidak tersedia kamar bagi peneliti bidang agama dan keagamaan dalam rumah baru BRIN.

Membuang Riset Agama

Mafhum bahwa agama merupakan bidang yang tidak didesentralisasikan. Kebijakan pembangunan bidang agama bersifat sentralistik. Selaras dengan itu, SDM peneliti kementerian agama seyogyanya mendukung penyelenggaraan ilmu pengetahuan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional bidang agama. Keberadaan SDM peneliti agama berbeda dengan SDM peneliti lainnya yang bisa mendukung kebijakan pemerintah daerah. Kementerian Agama bersifat sentralistik.

Terbitnya Perpres 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menguatkan narasi adanya deprivatisasi agama. Agama menjadi persoalan privat, tak terkecuali persoalan riset bidang agama. Pemerintah cq BRIN tidak secara eksplisit menyebutkan adanya ke deputian yang mengurus riset agama.

Riset bidang Agama dan Keagamaan bukan menjadi bagian dari Prioritas Riset Nasional (PRN). Ada kesan, pemerintah sengaja membuang riset bidang agama.

Membuang riset agama merupakan upaya menjauhkan/menghilangkan agama dari sektor publik. Hal ini mirip ketika frasa agama hilang dalam rumusan visi Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035.

Gejala yang sama dapat dicermati dari polemik draft RUU HIP yang hendak menafsir Pancasila dengan semangat trisila dan ekasila. Fenomena serupa, yakni hilangnya tokoh sekaliber KH Hasyim Asy'ari dalam kamus sejarah Indonesia. Semua memiliki kesamaan: seolah sengaja menjauhkan/menghilangkan agama.

Sumber Nilai

Padahal, agama sumber nilai yang sangat penting bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Berbicara Indonesia, berarti kita sedang membicarakan agama (baca Islam). Islam yang dibangun adalah Islam rahmatan lil 'alamin, Islam yang selaras dengan Pancasila sebagai falsafah negara. Islam yang hadir sebagai ruh dalam denyut kehidupan bangsa Indonesia.

Penelitian agama, selain memiliki nilai historis juga telah menunjukkan manfaat nyata untuk bangsa. Stabilitas nasional bisa tercapai manakala kerukunan umat beragama tercapai. Selain memang, riset agama memberikan sumbangsih nyata terhadap berbagai kebijakan negara, tak terkecuali mendorong mewujudkan Indonesia yang maju.

Sebenarnya ada “jalan keluar” dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2021 tentang BRIN agar riset agama tidak hilang sama sekali. Meskipun, tidak masuk ke deputian tertentu, riset bidang agama dan keagamaan bisa masuk sebagai unsur pendukung menjadi “pusat” sebagaimana ketentuan pasal 41 dan 45. Persoalannya adalah apakah lembaga BRIN (sebagai representasi pemerintah) mau membuka “ruang” membentuk misalnya Pusat Penelitian Agama dan Keagamaan?

Secara teknis, cara mudah konsolidasi dengan transformasi secara kelembagaan. Secara mudah, berganti “logo” atau “papan nama” ke BRIN. Persoalannya adalah apakah Kementerian Agama “Ikhlas” melepaskan SDM, infrastruktur dan anggaran ke BRIN?

Pertanyaan serupa, apakah BRIN sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang membidangi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Litbangjirap) serta Inovasi dan Inovasi akan membuat kamar baru untuk peneliti agama? Secara teknis, Pasal 41 dan 45 Perpres Nomor 33 Tahun 2021 membuka ruang untuk itu. Jalan lain, tentu bisa dengan merevisi Perpres 33 Tahun 2021 dengan memasukkan agama dalam deputian tersendiri.

Dengan cara ini, kesan bahwa pemerintah sengaja membuang riset agama tidak benar. Wallahu'alam. (*)

Tribun Jaten, 7 Juni 2021